



## PERTAHUN ANTARA RP 600.000 HINGGA RP 2 JUTA Honor Pelayan Masyarakat Bentuk Apresiasi

**YOGYA (KR)** - Besaran honor bagi pelayan masyarakat diputuskan mengacu pada standar harga barang dan jasa (SHBJ). Pemberian honor tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemkot Yogya atas jasa pengabdian para pelayan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogya Tri Hastono, mengungkapkan kebijakan tersebut baru digulirkan tahun ini. "Honor akan diberikan secara non tunai. Besarannya sudah ditetapkan berdasarkan SHBJ," ungkapnya, Selasa (7/1).

Kebijakan honor bagi pelayan masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) 72 Tahun 2019. Pelayan masyarakat itu ialah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Ketua Pengurus Kampung, Ketua RW, Ketua RT serta Ketua PKK dari tingkat kecamatan hingga RT. Besaran honor masing-masing dibedakan sesuai tingkat pengabdian.

Bagi Ketua LPMK sebesar Rp 500.000 per tiga bulan, Ketua Pengurus Kampung Rp 350.000 per tiga bulan, Ketua RW Rp 300.000 per tiga bulan, Ketua RT Rp 250.000 per tiga bulan, Ketua PKK Kecamatan Rp 225.000 per tiga bulan, Ketua PKK Kelurahan Rp 200.000 per tiga bulan, Ketua PKK RW Rp 175.000 per tiga

bulan, dan Ketua PKK RT Rp 150.000 per tiga bulan. Meski penetapannya per tiga bulan, namun pembayaran atau pencairan-nya tiap semester. Sehingga dalam setahun akan diberikan sebanyak dua kali. Jika dikalkulasi dalam setahun, honor tertinggi ialah Ketua LPMK sebesar Rp 2 juta, dan terendah Ketua PKK RT sebesar Rp 600.000.

"Mekanisme penetapan bukan per bulan karena mereka bukan pegawai Pemkot. Tapi ini bentuk apresiasi atas kiprahnya di masyarakat," imbuh Tri Hastono.

Diakuinya, antara satu pelayan masyarakat dengan lainnya mendapatkan honor beragam. Hal ini karena tingkat kiprah dan beban pengabdian-nya juga berbeda. Misalnya bagi Ketua LPMK kini memiliki tugas ikut mensukseskan program yang dibiayai dari dana kelurahan di samping program pemberdayaan yang sudah rutin tiap tahun. Namun demikian, kiprah pelayan masyarakat lainnya juga tidak bisa diabaikan. Perangkat RW hingga RT selama ini juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan program.

"Anggaran untuk honor tersebut kuasa penggunaannya di kecamatan. Kami akan ikut mensosialisasikan sesuai dengan kewenangan kami," tandas Tri Hastono. (Dhi)-m

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Tapem dan Kesra                      | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |              |       |                 |

Yogyakarta, 18 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005